

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adolf, Huala, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik :Edisi Revisi IV*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rafa Grafindo Persada, Jakarta.
- Brotodiharjo, Santoso, 1998, *Pengantar singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung.
- Etty, Susilowati, 2013, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fukuyama, Francis, 2004, *State Building*, Cornell University Press, New York.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan* (edisi revisi 2011), Andi, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muqodim, 1999, *Perpajakan*, UII Press dan Ekonosia, Yogyakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2015, *Pokok-pokok hukum perpajakan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prasetyono, Dwi Sunar, 2012, *Buku Pintar Pajak*, Laksana, Yogyakarta.
- Rahman, Arief dan H.Zaedi Asyhadie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Santosa, Agus, 1992, *Perpajakan Indonesia*, Satya Wacana, Semarang.
- Shubhan, Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P., 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Dengan Surat Paksa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sinaga, Syamsudin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subhan, M. Hadi, 2014, *hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Statistik Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W., 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT Gramedia, Jakarta.
- Tumbuan, Fred B.G., 2001, *Pokok-pokok undang-undang tentang kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998: dalam Penyelesaian Utang-piutang melalui kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Rudhy A. Lontoh, Ed., Alumni, Bandung.
- Wahyutomo, Imam, 1994, *Pajak*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Widjowati, Dijan, 2012, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Zuraida, Ida dan L.Y. Hari Sih Advianto, 2011, *Penagihan Pajak*, Ghalia Indonesia, Bogor.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 129. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, PMK 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926).

### **C. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 67/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn., Tentang Permohonan Keberatan Atas Daftar Pembagian Tahap II (Kedua) Sekaligus Penutup.

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tentang Permohonan Kasasi Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn., Tentang Permohonan Keberatan Atas Daftar Pembagian Tahap II (Kedua) Sekaligus Penutup.

Putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pdt. Sus/Pailit/2016 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor. 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Putusan Peninjauan Kembali No. 070 PK/PDT.SUS/2009 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor. 124 K/Pdt.Sus/2009.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 168 PK/Pdt.Sus/2012 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor. 963 K/Pdt.Sus/2010.

#### **D. ARTIKEL JURNAL**

Bahl, Roy dan Richard M. Bird, *Tax Policy in Developing Countries : Looking Back-and Forward*, "National Tax Journal", Vol. LXI, No. 2, 2008.

IMF, *Fiscal Implications of the Global Economic and Financial Crisis*, IMF Staff Position Note SPN/09/13, 2009.

Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Keapilitan*, "Jurnal Hukum", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Edisi Khusus Vol. 16 Oktober, 2009.

#### **E. HASIL PENELITIAN/ TUGAS AKHIR**

Albert Richi Aruan, 2010, *Kedudukan negara atas utang pajak PT Artika Optima Inti dalam Kasus Kepailitan*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Berdikari Panjaitan, 2016, *Legalitas Pembagian Hasil Penjualan Jaminan Fidusia Untuk Pelunasan Utang Pajak dan Pertanggung Jawaban Kurator (Studi Kasus Kepailitan PT Yinchen Indo Mining Industry)*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

David Steven M, 2015, *Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Kekayaan Anggota Commanditaire Venootschap*, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hexy Nurbaiti, 2007, *Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer dalam keadaan pailit*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hiazintus Yuriko Arlukito, 2014, *Analisis Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung terhadap Hak Mendahulu atas Utang Pajak pada Kasus Kepailitan*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rian Raditya, 2014, *Renvoi Prosedur Sebagai Upaya Hukum Terhadap Tagihan Kreditur yang Ditolak oleh Kurator Dalam Suatu Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 32/Pailit Keberatan/2010/PN. Niaga. JKT.PST)*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **F. MAKALAH/PIDATO**

Nota Keuangan dan APBN Tahun 2017, “*Bab 3 (Bagian II) : Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2017 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2018-2019*”, Makalah, disampaikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

## **G. INTERNET**

Legoresky, Pengertian Dasar Perpajakan, <http://perpajakan.indonesiaraya.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2017